BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: bawaslu.batola@gmail.com

Nomor : 030/BAWASLU.PROV-KS.03/PM.04/III/2020 Marabahan, 06 Maret 2020
Lampiran : 2 (dua) Lembar
Perihal : Rekomendasi Penyampaian Hasil Pencermatan Calon Anggota PPS Se-Kabupaten Barito Kuala

Kepada Yth :

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala

di –

Tempat

I. Dasar Hukum :

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi menjadi Undang-Undang;
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyenggara Pemungutan Suara dalam Penyelengaraan Pemilihan Umum;
f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
g. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Rakyat Indonesia Nomor SS-0031/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020, tanggal 13 Januari 2020 perihal Panduan Pengisian Formulir Model A dan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pilkada 2020.
h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tanggal 4 Februari 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,

Scanned by CamScanner

Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Walikota dan Wakil Walikota;

i. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 112/HK.02-SD/KPU/01/II/2020 Tanggal 11 Februari 2020 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

j. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Nomor 64/PP.04.2-Pu/6403/KPU-Kab/II/2020 Tanggal 15 Februari 2020 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020;

k. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Nomor 98/PP.04.2-Pu/6304/KPU-Kab/II/2020 Tanggal 24 Februari 2020 tentang Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020;

l. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Nomor 142/PP.4-Pu/6304/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 02 Maret 2020 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

II. Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyenggara Pemungutan Suara dalam Penyelengaraan Pemilihan Umum, menyatakan bahwa syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS meliputi:

a. warga negara Indonesia;

b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;

c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

e1. tidak menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik dan tim kampanye sesuai tingkatannya;

f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;

g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;

i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;

Scanned by CamScanner

k. belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS; dan

l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

III. Berdasarkan hasil penelitian dan penelaahan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Barito Kuala terhadap nama-nama yang mendaftar calon anggota PPS se-Kabupaten Barito Kuala, telah ditemukan adanya nama-nama calon anggota PPS yang **tidak memenuhi syarat** sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 dan juga ditemukan adanya indikasi calon anggota PPS yang lulus administrasi tersebut merupakan pasangan suami isteri. (*data terlampir*)

IV. Berdasarkan hal diatas, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala memohon kepada KPU Kabupaten Barito Kuala agar benar-benar mencermati/meneliti kembali, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan nama-nama calon anggota PPS se-Kabupaten Barito Kuala sebelum dinyatakan lulus seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini disampaikan atas perhatianya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

RAHMATULAH AMIN, S.H.I

Tembusan :
1. *Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Kalimantan Selatan*
2. *Arsip*

Scanned by CamScanner

ALAT KERJA PENGAWASAN CALON ANGGOTA PPS SE-KABUPATEN BARITO KUALA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMATAN SELATAN TAHUN 2020

FOKUS PENGAWASAN :

1. Masa jabatan 2 periode pada jabatan yang sama
2. Keterliban pengurus/anggota partai politik
3. Ikatan perkawinan sesama penyelenggara pemilu
4. TIM KEMPANYE
5. Pernah diberhentikan oleh DKPP
6. ada tidaknya usia tidak memenuhi syarat

KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	NO	NAMA	PENGHITUNGAN 2 PERIODE											HASIL PENGAWASAN DAN PENCERMATAN					KET.
					Periode Pertama (Tahun 2004 s.d 2008)			Periode Kedua (Tahun 2009 s.d 2013)			Periode Ketiga (Tahun 2014 s.d 2018)			Periode Keempat (dari tahun 2019)		JABATAN 2 PERIODE JABATAN YANG SAMA	KETERLIBATAN PENGURUS/ ANGGOTA PARTAI POLITIK/ TIM KAMPANYE	IKATAN PERKAWINAN SESAMA PENYELENGGARA PEMILU	PERNAH DIBERHENTIKAN OLEH DKPP	MEMASTIKAN ADA TIDAKNYA USIA TIDAK MEMENUHI SYARAT	
					Pileg dan Pilres 2004	Pilgub 2005	Pibup 2007	Pileg dan Pilpres 2009	Pilgub 2010	Pibup 2012	Pileg dan Pilpres 2014	Pilgub 2015	Pilbup 2017	Pemilu 2019	Pilkada 2020						
BARITO KUALA	BARAMBAI	BAGAGAP	1	TABERANI					ada				ada	ada		√					Menjadi anggota PPS selama 2 Periode pada jabatan yang sama
		BARAMBAI KOLAM KANAN	1	KETUT RASE					ada	ada			ada			√					
			2	MADE KASIM					ada			ada				√					
		HANDIL BARABAI	1	HUSNI, S.Pd					ada		ada					√					
	TABUKAN	KARYA INDAH	1	SYAMSUDIN NOOR						ada	ada					√					
			2	SARIAH													√				A.n SARIAH terdaftar sebagai Caleg DPRD Kab/Kota Dapil 1 No. urut 1 dari Partai Perindo pada Pemilu Tahun 2019
		KARYA MAKMUR	1	ASNURI						ada	ada			ada		√					Menjadi anggota PPS selama 2 Periode pada jabatan yang sama
		PANTANG BARU	1	IDAHAM						ada	ada	ada	ada			√					
		TELUK TAMBA	1	AKHMAD SARMIZI						ada	ada	ada	ada			√					
	TABUNGANEN	SEI. TERAS DALAM	1	SALEH ABDULLAHRAHMAN					ada		ada			ada		√					
		TANGGUL REJO	1	KUSWANDI						ada	ada					√					
		BERINGIN KENCANA	1	JAMHURI						ada	ada	ada		ada		√					
			2	BAIHAKI						ada	ada		ada			√					
		SEI. TELAN BESAR	1	HUSNI THAMRIN					ada	ada	ada	ada				√					
		SEI. TELAN MUARA	1	ABDUL HAMID						ada		ada	ada			√					
	RANTAU BADAUH	SEI. PANTAI	1	MUJAHIDIN					ada	ada	ada					√					
	CERBON	SEI. TUNJANG	1	GAJALI RAHMAN						ada	ada	ada				√					
		BADANDAN	1	SALAPIANNOR					ada	ada	ada	ada		ada		√					
		SEI. KAMBAT	1	NOVI AGUS PURWANTI														√			Pasangan Suami - Isteri
			2	HERLIYANTI														√			
	ANJIR PASAR	ANDAMAN II	1	PAHRURAZI					ada	ada			ada	ada		√					Menjadi anggota PPS selama 2 Periode pada jabatan yang sama
		ANJIR PASAR KOTA II	1	HARYATI					ada	ada	ada	ada	ada	ada		√					

Scanned by CamScanner

	KECAMATAN	DESA	NO	NAMA	PENGHITUNGAN 2 PERIODE											HASIL PENGAWASAN DAN PENCERMATAN					KET.
					Periode Pertama (Tahun 2004 s.d 2008)			Periode Kedua (Tahun 2009 s.d 2013)			Periode Ketiga (Tahun 2014 s.d 2018)			Periode Keempat (dari tahun 2019)		JABATAN 2 PERIODE JABATAN YANG SAMA	KETERLIBATAN PENGURUS/ ANGGOTA PARTAI POLITIK/ TIM KAMPANYE	IKATAN PERKAWINAN SESAMA PENYELENGGARA PEMILU	PERNAH DIBERHENTIKAN OLEH DKPP	MEMASTIKAN ADA TIDAKNYA USIA TIDAK MEMENUHI SYARAT	
					Pileg dan Pilres 2004	Pilgub 2005	Pilbup 2007	Pileg dan Pilpres 2009	Pilgub 2010	Pilbup 2012	Pileg dan Pilpres 2014	Pilgub 2015	Pilbup 2017	Pemilu 2019	Pilkada 2020						
BARITO KUALA	KURIPAN	KURIPAN	1	USRANI						ada	ada		ada			√					
	MANDASTANA	TATAH LAYUNG	1	AHMAD RIYADI, S.Pd					ada	ada	ada	ada	ada	ada		√					Menjadi anggota PPS selama 2 Periode pada jabatan yang sama
		PUNTIK LUAR	1	ABDUL WAHID					ada				ada	ada		√					
	ALALAK	BERANGAS BARAT	1	SAUDAH, S.Pd					ada			ada	ada	ada		√					
			2	ILMI					ada	ada	ada	ada	ada	ada		√					
	BELAWANG	SUKARAMAI	1	ANANG AMRULLAH					ada		ada	ada				√					
			2	SA'DIAH						ada		ada				√					
		BAMBANGIN	1	GUSTI ZAINUDIN					ada	ada	ada					√					
		SEI. SELUANG PASAR	1	AGUS SUSILAWATI						ada	ada					√					Menjadi anggota PPS selama 2 Periode pada jabatan yang sama
		RANGGA SURYA	1	MUHAMMAD SAM'ANI						ada	ada	ada	ada			√					
		KARANG DUKUH	1	PURNOMO					ada	ada	ada					√					
		SAMUDA	1	PAHRIADI						ada	ada	ada	ada			√					
		PATIH SELERA	1	MARKUS LAMMA							ada		ada			√					
		BELAWANG	1	TANTAWY JAUHARI														√			Pasangan Suami - Isteri
			2	KHAIRUNISA														√			
	MEKARSARI	TINGGIRAN DARAT	1	HAMRANSYAH					ada		ada					√					
	TAMBAN	KOANDA	1	ANI SURIANI					ada		ada					√					
		PURWOSARI BARU	1	SUWOTO						ada	ada	ada	ada	ada		√					
		TAMBAN BANGUN BARU	1	ILMI RUSMAYADI					ada		ada	ada				√					Menjadi anggota PPS selama 2 Periode pada jabatan yang sama
		TAMBAN KECIL	1	JAM'ANI						ada	ada	ada	ada			√					
		TAMBAN MUARA	1	RABIAH						ada	ada		ada			√					
	WANARAYA	DWIPASARI	1	I MADE WASTAWAN						ada			ada	ada		√					
		KOLAM MAKMUR	1	PRIYONO						ada			ada	ada		√					
		SUMBER RAHAYU	1	HINNI														√			Pasangan Suami - Isteri
			2	FATCHUR ROHMAN														√			

Marabahan, 06 Maret 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
a.n Koordv Pengawasan, Humas dan Hubal

AHDI HANAFIAH, S.Sos

Scanned by CamScanner